Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Komunikasi Politik dalam Konflik Saluran Air Sawah di Kecamatan Undaan, Kudus: Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya

Malik Abdul Khakim

Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian konflik saluran air sawah di Kecamatan Undaan, Kudus dengan jalan membuka komunikasi antara kedua belah pihak yang diwarnai oleh perselisihan antar warga. Artikel ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara komunikasi yang baik. Selain itu konflik yang terjadi antara Kepala Desa Wates dengan Kepala Desa Undaan Lor yang mana berkaitan dengan masalah saluran irigasi, pada dasarnya hanyalah bertumpu pada kurangnya komunikasi yang efektif antara keduanya dalam upaya mempertahankan kepentingan masing-masing. Maka dari itu, Bupati Kudus hadir sebagai pihak ketiga sekaligus penengah dalam kasus tersebut dan menyelenggarakan musyawarah sebagai jalan membuka komunikasi yang efektif diantara keduanya.

Kata Kunci: Konflik, Komunikasi, Kecamatan Undaan-Kudus

Latar Belakang

Kabupaten Kudus merupakan daerah tingkat II yang berada di pantai utara pulau Jawa sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus yang berbatasan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati, merupakan daerah yang memiliki wilayah sawah hampir mencapai setengah dari luas wilayahnya. Tidak heran apabila sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani maupun buruh tani (meskipun jumlahnya masih berada di bawah jumlah buruh pabrik).

Kabupaten Kudus terdiri atas sembilan kecamatan, yaitu Kota, Kaliwungu, Jati, Undaan, Gebog, Dawe, Bae, Mejobo, dan Jekulo. Kecamatan Undaan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain, tepatnya adalah Kabupaten Pati, merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian.

Pada 5 Oktober 2016, Humas Polres Kudus mengunggah sebuah artikel berjudul Konflik di Undaan Kudus Dimusyawarahkan di alamat web <https://tribratanewskudus.com/konflik-sosial-di-undaan-kudus-dimusyawarahkan/>. Artikel tersebut menunjukkan adanya konflik di wilayah Kecamatan Undaan, Kudus. Dalam tulisan tersebut diindikasikan bahwa terjadi konflik sosial yang bukan hanya merupakan konflik antar individu, melainkan konflik antar warga desa yang bahkan mengikutsertakan kepala desa setempat.

Pembahasan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian. Sebagai lahan pertanian, tentunya membutuhkan irigasi atau pengairan sebagai salah satu komponen yang paling penting dalam

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

hal pertanian.

Permasalahan mengenai pengairan dan saluran irigasi tidak hanya apabila pada musim kemarau dimana akan kekurangan air sebagai kebutuhan yang sangat vital dalam pertanian. Melainkan juga termasuk pada masalah keseharian dimana irigasi terhadap lahan pertanian tentunya menghasilkan sisa irigasi yang pada umumnya disalurkan ke aliran irigasi utama seperti kali atau sungai terdekat.

Kembali berfokus pada latar belakang timbulnya konflik sosial di Kecamatan Undaan, Kudus. Dimana konflik terjadi antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor. Berkaitan dengan masalah irigasi sebagaimana telah dipaparkan pada dua paragraf di atas. Di wilayah persawahannya, Desa Wates dan Desa Undaan Lor dibatasi oleh sebuah jalan pertanian yang biasa disebut tanggul. Desa Wates berada di sebelah kiri jalan, sedangkan Desa Undaan Lor di sebelah kanan jalan.

Permasalahan bermula dari kondisi dimana saluran pembuangan air sisa irigasi di Desa Wates mengalami hambatan sehingga menimbulkan saluran air menjadi tidak lancar. Sedangkan saluran pembuangan air sisa irigasi di Desa Undaan Lor yang berada di seberang jalan tidak mengalami hambatan sehingga relatif lancar.

Sirin, Kepala Desa Wates atas kesepakatan dengan warganya bermaksud untuk menyalurkan saluran air sisa pembuangan irigasi di desanya menembus jalan dan mengalirkannya ke saluran air sisa pembuangan irigasi di Desa Undaan Lor. Akan tetapi, Edi Pranoto, S.E. selaku Kepala Desa Undaan Lor tidak menyetujuinya. Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi bahwa apabila saluran air sisa irigasi dari Desa Wates disalurkan menuju ke saluran air irigasi di Desa Undaan Lor, maka akan menyebabkan bertambahnya intensitas air di saluran air tersebut sehingga akan mengganangi lahan sawah di Desa Undaan Lor.

Situasi dan Kondisi pada Saat Terjadinya Konflik

Konflik sosial antara masyarakat Desa Wates di bawah pimpinan kepala desanya yaitu Sirin, dengan masyarakat Desa Undaan Lor di bawah pimpinan kepala desanya, Edi Pranoto, S.E., yang dipicu oleh masalah saluran air sisa pembuangan hasil irigasi menimbulkan terjadinya disharmoni di antara kedua warga desa. Konfliknya bahkan mencuat hingga mampu menarik perhatian dari Bupati Kudus, H. Musthofa untuk turun tangan langsung dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Proses dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, Bupati Kudus terjun langsung ke lapangan dan melakukan evaluasi di lapangan, khususnya terhadap saluran air pembuangan di Desa Wates dengan menggunakan dana desa. Sedangkan pemerintah daerah hanya melakukan pendampingan terhadapnya. Bupati Kudus tersebut menyarankan kepada Kepala Desa Wates agar pembangunan saluran air dibuat membujur dari arah timur ke barat dengan panjang sekitar 3 km.

Setelah melakukan peninjauan langsung di lapangan, Bupati Kudus langsung mempertemukan kedua kepala desa tersebut beserta perangkatnya di Balai Desa Undaan Lor. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sirin (Kepala Desa Wates), Edi Pranoto (Kepala Desa Undaan Lor), serta Zuri, Sihong, Naryo, Disan, Haryono, Sukemi, Nurkolik, dan Harto dari Kelompok Tani.

Pada pertemuan tersebut dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dengan bantuan dari pihak ketiga yaitu Bupati Kudus sendiri. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan akan pembangunan saluran air di Desa Wates menggunakan dana desa milik desa tersebut. Kemudian pemerintah daerah hanya melaksanakan tugasnya hanya sampai pada

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

pendampingan. Pelaksanaan pembangunan saluran air tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu satu minggu dengan pantauan dari pihak kepolisian setempat.

Tinjauan Ilmiah dan Tinjauan Pustaka

Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan menurut Winardi (2007), adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi. Konflik tersebut dapat timbul apabila kedua belah pihak saling bertentangan dan saling mempertahankan pendapatnya tanpa menggunakan sikap toleransi.

Konflik secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang sama langka di sama waktu (Wallenstein dalam Ramadhan, 2016:141). Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa konflik akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang memperebutkan sumber daya yang sama (tentunya jumlahnya terbatas) pada waktu yang sama pula.

Penyebab konflik sendiri menurut Anwar (2015:149), meliputi ketakutan akan ketidaktersediaan sumber daya, bentuk kecurangan, ketidaknyamanan, penyerangan, kelelahan, emosi, bentuk hubungan yang terjalin, serta tingkat pemahaman dan pengalaman masa lalu yang berbeda.

Simon Fisher (dalam Ramadhan, 2016: 141) menyatakan bahwa konflik merupakan keniscayaan, tak terhindarkan, dan kerap kali relatif. Menurut G. R. Terry dalam Winardi (2007), konflik biasanya mengikuti suatu pola yang teratur, yang terdiri atas empat tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama yaitu timbulnya krisis. Dalam penjelasannya, Terry mengungkapkan bahwa pada tahap ini, terlihat adanya bahaya potensial tertentu yang mengancam pengoperasian secara harmonis serta eksistensi yang bersangkutan. Selain itu dalam tahapan ini juga mulai terlihat pertentangan paham secara serius.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, timbulnya krisis pada kasus terjadinya konflik antara Desa Wates dan Desa Undaan Lor dipicu oleh rencana Kepala Desa Wates yang bermaksud untuk mengalirkan air sisa pembuangan irigasi di desanya menuju ke saluran irigasi di Desa Undaan Kidul. Akan tetapi rencana tersebut tidak mendapat izin dari Kepala Desa Undaan Lor dengan dalih akan berpotensi menggenangi lahan sawah di Desa Undaan Lor tersebut.

Pertentangan terjadi diantara kedua kepala desa tersebut. Masing-masing kepala desa berusaha keras agar pendapatnya diterima oleh pihak lawan. Hal ini sebenarnya wajar karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kepala desa untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Akan tetapi justru hal tersebutlah yang menjadikan konflik antara kedua kepala desa tersebut lebih mengental.

Tahap kedua adalah gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi, maksudnya adalah pertentangan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Pada tahap ini, konflik yang berlangsung mulai menarik perhatian para pimpinan dan dirasa perlu adanya tindakan penyelesaian tertentu, meskipun belum ada upaya yang jelas untuk menyelesaikannya.

Tahap yang ketiga adalah konfrontasi menjadi pusat perhatian. Dimaksudkan disini adalah pada tahap ini, konfrontasi yang telah menjadi pusat perhatian tadi menyebabkan adanya simpati dari para pimpinan yang menduduki peringkat lebih tinggi untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan mengenai kasus tersebut. Pada tahapan ini, biasanya disampaikan janji-janji untuk mengatasi keluhan-keluhan yang ada, serta mulai dibuat suatu rencana untuk tindakan selanjutnya.

Pertentangan yang terjadi antara rencana Kepala Desa Wates dan pendapat Kepala Desa Undaan Lor yang berlangsung sengit telah menarik perhatian Bupati Kudus pada saat itu, yaitu

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

H. Musthofa. Musthofa yang simpati terhadap konflik tersebut memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan dan mempertemukan antara kedua belah pihak beserta perangkatnya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Tahap Keempat adalah krisis dialihkan. Dimana pada tahap ini, dilakukan penelitian tentang apakah keluhan yang disampaikan dapat dibenarkan atau tidak. Dipersoalkan prosedur-prosedur yang diusulkan untuk kemudian diambil keputusan.

Dalam musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa Wates, Kepala Desa Undaan Lor, serta beberapa warga yang tergabung dalam kelompok tani tersebut salah satunya menghadirkan keputusan bahwa Desa Wates akan membangun saluran air irigasi sendiri menggunakan dana desa miliknya dengan dampingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan pengawasan dari pihak kepolisian setempat.

Ada empat cara untuk mengurangi adanya konflik menurut Zalaback dalam Anwar (2015:156), yaitu sebagai berikut:

Mengidentifikasi kemungkinan sejumlah isu dan fokus pada pendekatan mengenai isu yang dihadapi:

- a. Menjabarkan perilaku dan dampak untuk dihindari selama konflik berlangsung;
- b. Menunjukkan kepedulian terhadap data yang diperoleh; dan
- c. Menawarkan bentuk kompromi.

Dalam pandangan fungsional, konflik sebenarnya dapat dikelola. Manajemen konflik dapat dipahami sebagai serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku dengan pihak luar dalam konflik. Manajemen konflik tidak hanya dipahami sebagai upaya mengenali konflik dan menganalisa agar konflik dapat dikontrol tetapi juga dipahami sebagai gagasan, teori, dan metode untuk memahami konflik dan praktik kolektif untuk mengurangi potensi kekerasan dan meningkatnya harmonisasi dalam proses politik (Ramadhan, 2016:142).

Pada dasarnya, penyelesaian konflik tersebut dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Komunikasi yang mana menurut Arifin (2011: 2) pada umumnya bertujuan untuk mempengaruhi atau berkaitan dengan aspek pengaruh (influence). Dalam hal ini, masing-masing pihak akan menyalurkan pengaruhnya sehingga keputusan yang akan diambil sebisa mungkin tidak akan merugikan mereka.

Komunikasi yang dimaksud sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tentunya adalah komunikasi yang berlangsung efektif. Menurut Rismi Somad dalam Anwar (2015: 153), Komunikasi yang efektif dianggap penting karena menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip komunikasi yang efektif yang disebut REACH (Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble). Respect atau menghargai yang dimaksudkan disini adalah dengan membangun komunikasi dengan rasa hormat dan sikap saling menghargai dan menghormati. Apabila pertentangan yang terjadi berlangsung dengan terlalu sengit sehingga hilang rasa hormat antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka komunikasi antara kedua belah pihak jika dilakukan dengan sekeras apapun tidak mungkin akan berhasil.

Empathy atau empati, yaitu kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti orang lain. Audible atau pemahaman, artinya pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan dengan baik secara langsung maupun menggunakan media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual. Clarity atau kejelasan, mengandung indikasi bahwa kejelasan dari pesan, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda. Sedangkan humble atau rendah hati yang dimaksudkan disini adalah sikap yang merupakan unsur terkait dengan membangun rasa menghargai orang lain yang didasarkan oleh sikap rendah hati yang dimiliki semua orang.

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Penutup

Konflik yang terjadi antara Kepala Desa Wates dengan Kepala Desa Undaan Lor yang mana berkaitan dengan masalah saluran irigasi, pada dasarnya hanyalah bertumpu pada kurangnya komunikasi yang efektif antara keduanya dalam upaya mempertahankan kepentingan masing-masing. Maka dari itu, Bupati Kudus hadir sebagai pihak ketiga sekaligus penengah dalam kasus tersebut dan menyelenggarakan musyawarah sebagai jalan membuka komunikasi yang efektif diantara keduanya.

Saran yang dapat diajukan oleh penyusun makalah dalam kasus ini adalah hendaknya membangun jembatan komunikasi yang efektif dengan menyingkirkan terlebih dahulu egoisme dan membuka lebar pandangan sehingga mampu melaksanakan komunikasi yang efektif dan menyelesaikan masalah dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anwar, Choerul. (Juli 2015). Manajemen Konflik untuk Menciptakan Komunikasi yang Efektif (Studi Kasus di Departemen Purchasing PT. Sumi Rubber Indonesia). Jurnal Interaksi. Vol. 4. No. 2. Hal. 148-157.
- Arifin, Anwar. (2011). Komunikasi Politik: Filsafat - Paradigma – Teori – Tujuan – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arumsari, N., Septina, W. E., Luthfi, M., & Rizki, N. K. A. (2017). KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DALAM MENDORONG INOVASI PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS TIGA DESA DI LERENG GUNUNG UNGARAN, JAWA TENGAH. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 87-100.
- Humas Polres Kudus. (2016, 5 Oktober). Konflik Sosial di Undaan Kudus Dimusyawarahkan. Diambil pada 9 Juni 2017 Pukul 01.26 WIB di <https://tribratanewskudus.com/konflik-sosial-di-undaan-kudus-dimusyawarahkan/>
- Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Ramadhan, M. F. S., & Wahyudi, T. H. (2016). PEMBIARAN PADA POTENSI KONFLIK DAN KONTESASI SEMU PEMILUKADA KOTA BLITAR: ANALISIS INSTITUSIONALISME PILIHAN RASIONAL. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 143-162.
- Seftyono, C. (2012). Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 16(1), 75-83.
- Seftyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Lutfi, M. (2016). Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 60-70.
- Widodo, I. (2017). DANA DESA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI FISKAL. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 66-86.
- Winardi. (2007). Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Pengembangan. Bandung: Mandar Maju.